

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO RIAU MENURUT PENGELUARAN

2010-2014



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
RIAU MENURUT PENGELUARAN
2010 - 2014**

<http://riau.bps.go.id>

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO RIAU MENURUT PENGELUARAN 2010- 2014

ISSN : 2406-8438
Nomor Publikasi : 14.552.2015.13
Katalog BPS : 9302004.14

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xi + 74 halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Penyunting :
Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis, BPS Provinsi Riau

Gambar Kulit :
Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran, BPS RI
Humas BPS Provinsi Riau

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

<http://riau.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*Industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*Expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*Income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan Tahun Dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

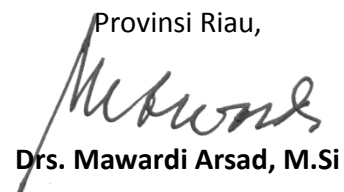
Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pekanbaru, Juli 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Provinsi Riau,



Drs. Mawardi Arsad, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Pendapatan Regional	2
1.2. Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	3
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	6
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	9
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	12
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	15
2.5 Perubahan Inventori	19
2.6 Ekspor dan Impor Barang	23
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN RIAU BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN 2010-2014	26
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Riau Menurut Pengeluaran	27
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	33
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	38
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	39
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	43
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	45

3.7	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	47
3.8	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	48
3.9	Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	50
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB RIAU MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2010-2014	52
4.1	PDRB (Nominal)	53
4.2	Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	54
4.3	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB ..	55
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	56
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	56
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	57
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	58
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	59
4.9	Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	60
4.10	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	61
	PENUTUP	63
	LAMPIRAN	65
	DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Riau 2010 – 2014	27
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Riau 2010 – 2014	28
3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Provinsi Riau 2010 – 2014	30
4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Riau 2010 – 2014	31
5	Sumber Pertumbuhan Menurut Pengeluaran, Provinsi Riau 2010 – 2014	32
6	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Provinsi Riau, 2010 – 2014	32
7	Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Provinsi Riau, 2010 – 2014	33
8	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Riau, 2010 – 2014	34
9	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Riau, 2010 – 2014	36
10	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Riau, 2010 – 2014	37
11	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Riau, 2010 – 2014	38
12	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Riau, 2010 – 2014	38
13	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Riau, 2010 – 2014	40
14	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Riau, 2010 – 2014	42
15	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Riau, 2010 – 2014	44
16	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Riau, 2010—2014	46
17	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Riau, 2010 – 2014	47
18	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Riau, 2010 – 2014	49
19	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Riau, 2010 – 2014	53

20	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2010 – 2014	55
21	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2010 – 2014	55
22	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Riau, 2010 – 2014	56
23	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2010 – 2014	57
24	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Riau, 2010 – 2014	57
25	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Riau, 2010 – 2014	58
26	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Riau, 2010 – 2014	60
27	Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Riau, 2010 – 2014	61
28	Incremental Capital Output Ratio Provinsi Riau, 2010 – 2014	62

DAFTAR GRAFIK

Tabel		Halaman
1	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 menurut Pengeluaran, Provinsi Riau, 2010 – 2014.....	29

<http://riau.bps.go.id>

BAB I
PENDAHULUAN

<http://riau.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<http://riau.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan

10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb.

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)

- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis

pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- Penyusutan
- Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

- i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
- j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah

dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb :

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada diwilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti : bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun

barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
 - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
 - g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
 - h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
 - i. Publikasi Statistik Konstruksi.
 - j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 - k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

3. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri

(*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan*.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB *adh Berlaku*. Untuk memperoleh nilai *adh Konstan* adalah dengan *men-deflate* PMTB (*adh Berlaku*) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB *adh Konstan* dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB *adh Konstan* terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB *adh Berlaku*, nilai PMTB *adh Konstan* tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB *adh Konstan* di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB *adh Berlaku* diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB *adh Konstan* adalah dengan cara *men-deflate* PMTB *adh Berlaku* dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB *adh Berlaku* untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan *adh*

Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan

bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;

- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan *menginflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<http://riau.bps.go.id>

BAB III

**TINJAUAN PEREKONOMIAN RIAU BERDASARKAN
PDRB PENGELUARAN 2010 - 2014**

<http://riau.bps.go.id>

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Riau akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 s.d. 2014, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Riau digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut :

3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB RIAU MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Riau menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Riau 2010-2014

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	107 024,04	128 523,81	149 001,46	171 473,39	200 358,79
2. Konsumsi LNPRT	1 442,39	1 650,93	1 913,57	2 258,19	2 728,47
3. Konsumsi Pemerintah	15 917,52	18 344,81	19 750,38	22 784,83	21 193,85
4. PMTB	95 152,51	117 859,91	134 301,36	148 221,96	170 067,25
5. Perubahan Inventori	12 399,01	20 884,90	29 094,99	35 401,42	30 133,34
6. Ekspor LN Barang dan Jasa	151 221,37	186 605,93	257 133,92	241 097,32	262 681,50
7. Impor LN Barang dan Jasa	15 109,08	23 020,75	28 201,10	28 638,30	26 480,61
8. Net Ekspor Antar Daerah	20 530,45	34 799,80	(4 501,86)	14 899,79	19 009,60
Total PDRB	388 578,23	485 649,34	558 492,72	607 498,59	679 692,18

Nilai PDRB Riau (adh Berlaku) selama periode tahun 2010 s.d. 2014 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

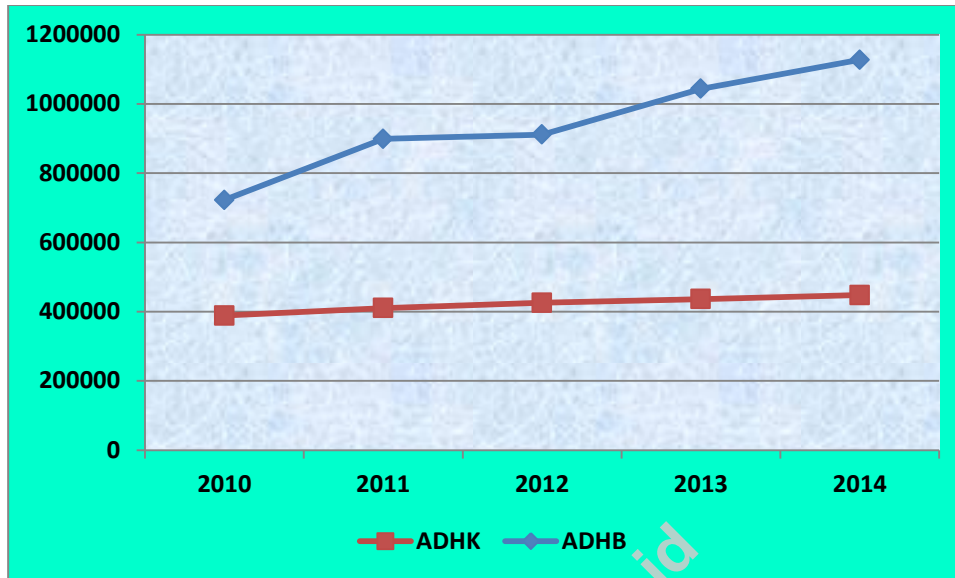
**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Riau
2010-2014**

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	107 024,04	115 084,79	122 841,59	131 131,82	140 607,69
2. Konsumsi LNPRT	1 442,39	1 528,42	1 624,58	1 755,96	2 027,08
3. Konsumsi Pemerintah	15 917,52	16 714,28	16 843,09	18 317,42	17 622,79
4. PMTB	95 152,51	110 627,86	121 068,56	127 560,70	129 562,83
5. Perubahan Inventori	12 399,01	20 509,74	20 604,71	14 950,46	11 199,14
6. Ekspor LN Barang dan Jasa	151 221,37	162 929,19	225 188,74	201 633,01	207 515,24
7. Impor LN Barang dan Jasa	15 109,08	21 726,04	24 683,13	23 127,60	20 117,98
8. Net Ekspor Antar Daerah	20 530,45	4 548,51	(57 862,16)	(36 015,78)	(40 800,55)
Total PDRB	388 578,23	410 215,84	425 625,99	436 206,00	447 616,23

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2010–2014, gambaran tentang perkembangan ekonomi Riau berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada Tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Riau, 2010 - 2014



Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah diabaikan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2010 – 2014, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik rata-rata sekitar 30 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Ekspor sangat dominan pada perekonomian di Riau dengan memberikan kontribusinya sekitar 38 s.d 46 persen produk Riau mampu menembus pasar internasional; sedangkan impor mempunyai peran yang relatif kecil dengan kontribusi sekitar 3 s.d 5 persen. Begitu juga net ekspor antar daerah memberikan kontribusi sekitar (0,81) sampai dengan 7 persen.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, Provinsi Riau
2010 – 2014**

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	27,54	26,46	26,68	28,23	29,48
2. Konsumsi LNPRT	0,37	0,34	0,34	0,37	0,40
3. Konsumsi Pemerintah	4,10	3,78	3,54	3,75	3,12
4. PMTB	24,49	24,27	24,05	24,40	25,02
5. Perubahan Inventori	3,19	4,30	5,21	5,83	4,43
6. Ekspor LN Barang dan Jasa	38,92	38,42	46,04	39,69	38,65
7. Impor LN Barang dan Jasa	3,89	4,74	5,05	4,71	3,90
8. Net Ekspor Antar Daerah	5,28	7,17	(0,81)	2,45	2,80
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 24 sampai dengan 25 persen. Sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah relatif kecil yaitu sekitar 3 sampai dengan 4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik relatif kecil. Di sisi lain, pada tahun 2010-2014 perdagangan internasional Riau yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih tinggi dari nilai impor. Perdagangan internasional Riau dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi “surplus”.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Riau dari tahun 2011 s.d 2014 secara rata-rata mencapai 3,88 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,57 persen (2011); 3,76 persen (2012); 2,49 persen (2013); dan 2,62 persen (2014). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 5,57 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2013 (2,49 persen).

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Riau
2010 – 2014**

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	-	7,53	6,74	6,75	7,23
2. Konsumsi LNPRT	-	5,96	6,29	8,09	15,44
3. Konsumsi Pemerintah	-	5,01	0,77	8,75	(3,79)
4. PMTB	-	16,26	9,44	5,36	1,57
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor LN Barang dan Jasa	-	7,74	38,21	(10,46)	2,92
7. Impor LN Barang dan Jasa	-	43,80	13,61	(6,30)	(13,01)
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
Total PDRB	-	5,57	3,76	2,49	2,62

Dari pertumbuhan komponen pengeluaran dapat diturunkan lagi sebuah tabel yaitu sumber pertumbuhan yang menggambarkan komponen yang sangat mempengaruhi pertumbuhan di suatu daerah. Secara umum komponen yang menjadi sumber pertumbuhan di Riau adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sekitar 1 sampai dengan 2 persen dan selalu positif setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Kemudian komponen PMTB memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sekitar 0 sampai dengan 3 persen dan selalu positif. Ekspor luar negeri Riau juga memberikan kontribusi terhadap sumber pertumbuhan Riau secara signifikan yaitu berkisar (0,11) sampai dengan 15,18 persen, namun ekspor luar negeri terkadang memberikan kontribusi yang negatif yaitu pada tahun 2010 (-0,11 persen) dan tahun 2013 (-5,53 persen).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Riau masih digerakkan secara dominan oleh konsumsi akhir yaitu konsumsi rumah tangga, lalu PMTB dan juga ekspor.

**Tabel 5. Sumber Pertumbuhan
Menurut Pengeluaran, Provinsi Riau
2010 – 2014**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1,28	2,07	1,89	1,95	2,17
2. Konsumsi LNPRT	(0,00)	0,02	0,02	0,03	0,06
3. Konsumsi Pemerintah	0,00	0,21	0,03	0,35	(0,16)
4. PMTB	1,07	3,98	2,55	1,53	0,46
5. Perubahan Inventori	2,53	2,09	0,02	(1,33)	(0,86)
6. Ekspor LN Barang dan Jasa	(0,11)	3,01	15,18	(5,53)	1,35
7. Impor LN Barang dan Jasa	0,75	1,70	0,72	(0,37)	(0,69)
8. Net Ekspor Antar Daerah	0,92	(4,11)	(15,21)	5,13	(1,10)
Total PDRB	4,94	5,57	3,76	2,49	2,62

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan perubahan harga yang wajar.

**Tabel 6. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Riau, 2010 – 2014**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	100,00	111,68	121,30	130,76	142,49
2. Konsumsi LNPRT	100,00	108,02	117,79	128,60	134,60
3. Konsumsi Pemerintah	100,00	109,76	117,26	124,39	120,26
4. PMTB	100,00	106,54	110,93	116,20	131,26
5. Perubahan Inventori	100,00	101,83	141,21	236,79	269,07
6. Ekspor LN Barang dan Jasa	100,00	114,53	114,19	119,57	126,58
7. Impor LN Barang dan Jasa	100,00	105,95	114,25	123,83	131,63
8. Net Ekspor Antar Daerah	100,00	765,08	7,78	(41,37)	(46,59)
Total PDRB	100,00	118,39	131,22	139,27	151,85

¹ Indeks Perkembangan

Jika dilihat pertumbuhan indeks implisitnya (Tabel 7), baik secara total PDRB maupun per komponennya masih dalam batas kewajaran. Dari periode 2010 sampai dengan 2014, pertumbuhan indeks implisit masih dalam batas kewajaran dalam pertumbuhan 1 digit kecuali pada tahun 2011 dan 2012 ada yang mencapai 2 digit. Secara total PDRB, pertumbuhan indeks implisit lebih dari 1 digit yaitu tahun 2011 sebesar 18,39 persen dan 2012 sebesar 10,84 persen. Sedangkan secara komponen pengeluaran, ada komponen yang pertumbuhan implisitnya 2 digit yaitu pada komponen konsumsi rumah tangga (11,68 persen) pada tahun 2011, ekspor luar negeri (14,53 persen) pada tahun 2011 dan PMTB (12,97 persen) pada tahun 2014.

Tabel 7. Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Riau, 2010 – 2014

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	-	11,68	8,61	7,81	8,97
2. Konsumsi LNPR	-	8,02	9,05	9,18	4,67
3. Konsumsi Pemerintah	-	9,76	6,84	6,08	(3,32)
4. PMTB	-	6,54	4,12	4,75	12,97
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor LN Barang dan Jasa	-	14,53	(0,30)	4,72	5,86
7. Impor LN Barang dan Jasa	-	5,95	7,83	8,38	6,30
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
Total PDRB	-	18,39	10,84	6,14	9,03

3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati hampir sepertiga dari total PDRB Riau sekitar 26 sampai dengan 29 persen. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 8, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2014 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah

rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 8. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Riau, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	107 024,04	128 523,81	149 001,46	171 473,39	200 358,79
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	107 024,04	115 084,79	122 841,59	131 131,82	140 607,69
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	27,54	26,46	26,68	28,23	29,48
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	80 020,97	96 096,16	111 407,13	128 209,20	149 806,56
b. ADHK 2010	80 020,97	86 047,92	91 847,61	98 046,15	105 131,17
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	19 197,39	22 444,71	25 344,22	28 421,31	32 376,29
b. ADHK 2010	19 197,39	20 097,79	20 894,59	21 734,79	22 721,02
Pertumbuhan ²					
a. Total Konsumsi RT	-	7,53	6,74	6,75	7,23
b. Per-RT	-	7,53	6,74	6,75	7,23
c. Perkapita	-	4,69	3,96	4,02	4,54
Jumlah RT (<i>unit</i>)	1 337 450	1 374 024	1 410 674	1 447 823	1 485 232
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	5 574,93	5 726,24	5 879,11	6 033,27	6 188,44

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010 s.d 2014 berfluktuatif tapi cenderung mengalami peningkatan. Kontribusi tertinggi pada tahun 2014 yaitu 29,48 persen dan terendah pada tahun 2011 sebesar 26,46 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Pada tahun 2010, secara umum setiap rumah tangga di Riau menghabiskan dana sekitar 80.020,97 ribu rupiah

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 96.096,16 ribu rupiah (2011); 111.407,13 ribu rupiah (2012); 128.209,20 ribu rupiah (2013); dan menjadi 149.806,56 ribu rupiah (2014).

Sementara itu, pada perkiraan adh Konstan 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 6 - 7 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,53 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Riau meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 3,96 sampai dengan 4,69 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pada periode 2010-2014 pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan berfluktuasi. Pada tahun 2011, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 7,53 persen, kemudian 6,74 persen di tahun 2012, 6,75 persen pada tahun 2013 dan 7,23 persen di tahun 2014. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per-kapita mengikuti pola pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yaitu sebagai berikut : 4,69 persen di tahun 2011, melambat di tahun 2012 menjadi 3,96 persen dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2013 menjadi 4,02 persen dan 4,54 persen di tahun 2014. Secara keseluruhan peningkatan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berkisar diantara 2 sampai dengan 3 persen. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa ada perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

**Tabel 9. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Riau, 2010 – 2014³**

		<i>(Persen)</i>				
Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	43,29	42,91	42,32	42,03	41,95	
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,66	3,68	3,70	3,64	3,75	
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,68	9,82	9,79	9,54	9,76	
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,67	5,58	5,21	5,19	5,36	
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	32,33	32,53	33,28	33,97	33,32	
f. Hotel dan Restoran	2,69	2,59	2,75	2,88	3,19	
g. Lainnya	2,69	2,88	2,95	2,76	2,67	
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Secara rata-rata dari tahun 2010 s.d 2014, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Riau, bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Kontribusi pengeluaran untuk makanan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya dari 43,29 persen pada tahun 2010; 42,91 persen (2011); 42,32 persen (2012); 42,03 persen (2013) dan menjadi 41,95 persen pada tahun 2014. Demikian sebaliknya kontribusi konsumsi bukan makan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 56,71 persen tahun 2010; 57,09 persen (2011); 57,68 persen (2012); 57,97 persen (2013) dan 58,05 (2014).

Dari pola kontribusi di atas, jelas menunjukkan peran konsumsi makanan perlahan tapi pasti bergeser ke konsumsi non makanan. Hal ini disebabkan pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Tabel 10. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Riau, 2010 – 2014

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-	6,38	6,49	6,75	6,08
b. Pakaian dan Alas Kaki	-	11,62	7,86	5,26	9,87
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-	6,51	4,61	8,82	8,54
d. Kesehatan dan Pendidikan	-	6,68	6,68	6,45	8,84
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	-	7,53	6,94	8,97	7,15
f. Hotel dan Restoran	-	13,33	12,07	7,68	9,68
g. Lainnya	-	20,26	8,60	10,96	10,92

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 2013, sedangkan untuk tahun 2014 mengalami perlambatan. Dengan masing-masing sebesar 6,38 persen (2011); 6,49 persen (2012) ; 6,75 persen (2013) ; dan 6,08 persen (2014). Sedangkan untuk non makanan pertumbuhannya berfluktuatif tapi cenderung mengalami peningkatan, yaitu 8,41 persen (2011); melambat di tahun 2012 menjadi 6,93 persen; meningkat menjadi 7,86 tahun 2013 dan meningkat kembali di tahun 2014 menjadi 8,06 persen. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Sementara itu, tingkat perubahan harga secara implisit disajikan dalam Tabel 11. Pertumbuhan indeks implisit berfluktuasi untuk setiap tahunnya dan untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga (inflasi) relatif tinggi terjadi pada tahun 2011, dan stabil (dibawah 2 digit) di tahun 2013. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 11,68 persen (2011) ; 8,61 persen (2012) ; 7,81 persen (2013) ; 8,97 persen (2014). Sedangkan untuk kelompok non makanan sebesar 11,51 persen (2011); 9,53 persen (2012); 7,24 persen (2013) dan 8,27 persen (2014). Pada periode tahun 2010 s.d 2014, baik harga kelompok makanan dan non makanan meningkat secara signifikan.

Tabel 11. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Riau, 2010 – 2014⁴

		(Persen)				
Kelompok Konsumsi		2010	2011	2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	-	11,68	8,61	7,81	8,97
b.	Pakaian dan Alas Kaki	-	11,90	7,39	8,57	9,94
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-	8,29	8,03	3,81	9,75
d.	Kesehatan dan Pendidikan	-	14,48	10,45	5,35	10,07
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	-	10,83	1,43	5,15	11,01
f.	Hotel dan Restoran	-	12,37	10,91	9,10	6,98
g.	Lainnya	-	2,24	9,59	8,86	17,82

3.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB yang kecil.

Tabel 12. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Riau, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 442,39	1 650,93	1 913,57	2 258,19	2 728,47
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1 442,39	1 528,42	1 624,58	1 755,96	2 027,08
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,37	0,34	0,34	0,37	0,40

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Kontribusi LNPRT yang kecil terhadap total PDRB bukan berarti peranannya terhadap kehidupan masyarakat menjadi kecil pula. Justru kegiatan yang dilakukan LNPRT menyentuh sampai lapisan masyarakat bawah. Di Riau, kontribusi LNPRT sangat kecil tidak sampai 1 persen, namun menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Mengingat peranan komponen LNPRT ini ditengah-tengah masyarakat cukup besar, perlu adanya perhatian dan pembinaan dari pemerintah maupun non pemerintah untuk dapat mengembangkan kegiatan LNPRT ini. Sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi pada total PDRB.

3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian provinsi Riau serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan pada Tabel 13.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah *adh Berlaku* sebesar 15.917,52 Miliar Rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2013 menjadi 22.784,83 Miliar Rupiah, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 21.193,85 Miliar Rupiah. Keadaan ini juga keadaannya sama pada konsumsi pemerintah *adh Konstan 2010*, yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke 2013, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari tahun 2010 sampai dengan 2013, kecuali pada tahun 2014 dari sisi kuantitas.

Kontribusi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan, dari 4,10 persen di tahun 2010 menjadi 3,12 persen pada tahun 2014. Sepanjang periode tersebut, kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 3,12 persen; sedangkan kontribusi tertinggi pada tahun 2010 yang mencapai 4,10 persen.

**Tabel 13. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Riau, 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	15 917,52	18 344,81	19 750,38	22 784,83	21 193,85
b. ADHK (Miliar Rp)	15 917,52	16 714,28	16 843,09	18 317,42	17 622,79
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	4,1	3,78	3,54	3,75	3,12
Konsumsi Pemerintah per- Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	2 855,20	3 203,64	3 359,42	3 776,53	3 424,75
b. ADHK 2010	2 855,20	2 918,89	2 864,90	3 036,07	2 847,70
Konsumsi Pemerintah per- Pegawai Pemerintah (Ribu Rp)					
a. ADHB	151 289,97	173 833,38	190 086,62	220 279,50	209 088,62
b. ADHK 2010	151 289,97	158 382,66	162 105,54	177 089,41	173 858,21
Pertumbuhan ⁵					
a. Total Konsumsi Pemerintah	-	5,01	0,77	8,75	-3,79
b. Konsumsi per-Kapita	-	2,23	-1,85	5,97	-6,20
c. Konsumsi per-Pegawai	-	4,69	2,35	9,24	-1,82
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁶	105 212	105 531	103 902	103 436	103 826
Jumlah Penduduk (000 Org)	5 574,93	5 726,24	5 879,11	6 033,27	6 188,44

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 2.855,20 ribu rupiah, dan terus meningkat sampai tahun 2013 menjadi 3.776,53 ribu Rupiah dan menurun pada tahun 2014 menjadi 3.424,75 ribu rupiah (lihat Tabel 13).

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

⁶ Tidak termasuk polisi dan militer

Tetapi rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) tidak sejalan dengan konsumsi pemerintah adh Berlaku. Rata-rata konsumsi pemerintah adh konstan mengalami fluktuasi dan laju pertumbuhan per-kapitanya ada yang mengalami kontraksi. Laju pertumbuhannya yang positif di tahun 2011 sebesar 2,23 persen dan 2013 sebesar 5,97 persen. Sedangkan laju pertumbuhan yang negatif terdapat di tahun 2012 dan 2014 dengan kontraksi masing-masing 1,85 persen dan 6,20 persen.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun 2010 ke 2013, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2014. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 151.289,97 ribu rupiah, kemudian meningkat dan pada tahun 2013 menjadi 220.279,50 ribu rupiah, tetapi pada tahun 2014 menurun menjadi 209.088,62 ribu rupiah. Keadaan ini juga berbanding lurus dengan konsumsi per pegawai adh konstan 2010. Persentase kenaikan per pegawai meningkat cukup signifikan pada tahun 2013 sebesar 9,24 persen, sedangkan pada tahun 2014 mengalami kontraksi sebesar 1,82 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 2013, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2014 (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Hal ini disebabkan pergantian Gubernur baru di Riau dan terjadi perubahan dalam penentuan kebijakan dalam penggunaan APBD. Sehingga pada akhirnya menyebabkan terganggunya penyerapan anggaran terutama untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adanya kebijakan Zero Growth terhadap pegawai pemerintah menyebabkan jumlah pegawai pemerintah di Riau cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Kecuali pada 2011, jumlah pegawai pemerintah meningkat dari 105.212 orang pada tahun 2010 menjadi 105.531 orang. Untuk tahun selanjutnya pegawai pemerintah terus menurun dan pada tahun 2014 menjadi 103.826 orang. Selama kurun waktu 2010 - 2014, secara total terjadi pengurangan 1.386 orang pegawai atau turun sebesar 1,32 persen.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 2013, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2014 baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan

kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 8,75 persen; untuk konsumsi per-kapita 5,97 persen; dan 9,24 persen untuk konsumsi per-pegawai. Sedangkan pertumbuhan total konsumsi pemerintah terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar -3,79 persen, begitu juga dengan konsumsi per-kapita sebesar -6,20 persen dan -1,82 persen untuk konsumsi per-pegawai.

Tabel 14. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Riau, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (Belanja Pemerintah ⁷)					
a. Konsumsi Kolektif (<i>Miliar Rp</i>)	9 792,91	10 664,35	12 333,45	13 809,67	12 821,77
(%)	61,52	58,13	62,45	60,61	60,50
b. Konsumsi Individu (<i>Miliar Rp</i>)	6 124,62	7 680,46	7 416,94	8 975,16	8 372,08
(%)	38,48	41,87	37,55	39,39	39,50
Total Konsumsi (<i>Miliar Rp</i>)	15 917,52	18 344,81	19 750,38	22 784,83	21 193,85
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan Riil (ADHK 2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	0,8	(3,32)	11,35	6,01	(3,90)
b. Konsumsi Individu	(1,00)	18,32	(13,05)	13,35	(3,63)
Total Konsumsi	0,10	5,01	0,77	8,75	(3,79)
Pertumbuhan Indeks Harga Implisit ⁸ (%)					
a. Konsumsi Kolektif	5,37	12,64	3,86	5,63	(3,39)
b. Konsumsi Individu	8,47	5,99	11,07	6,76	(3,21)
Total Konsumsi	6,55	9,76	6,84	6,08	(3,32)

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Tabel 14 menunjukkan bahwa sekitar 58 sampai dengan 62 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi kolektif. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah mengalami fluktuasi. Pada tahun

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

⁸ Tingkat pertumbuhan harga produk konsumsi

2010 proporsinya mencapai 61,52 persen dan pada tahun 2011 turun menjadi 58,13 persen. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 62,45 persen dan menurun kembali di tahun 2013 menjadi 60,61 persen dan 60,50 pada tahun 2014.

Sedangkan untuk konsumsi individu secara nominal berfluktuasi dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Dimana nilai nominal tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 8.975,16 Miliar Rupiah dan terendah pada tahun 2010 sebesar 6.124,62 Miliar Rupiah. Secara umum, proporsi konsumsi individu selama periode 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan. Sebesar 38,48 persen pada tahun 2010 menjadi 39,50 persen pada tahun 2014.

Hal lain yang patut dicermati adalah rasio, yaitu perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk (Tabel 13). Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah mengalami penurunan dari yang sebesar 105.212 orang (2010) menjadi 103.826 orang (2014). Sementara itu jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya dari sejumlah 5.574,93 ribu orang pada tahun 2010 menjadi 6.188,44 ribu orang pada tahun 2014. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut otomatis meningkat setiap tahunnya, dengan ratio sebagai berikut 52,99 (2010); 54,26 (2011); 56,58 (2012); 58,33 (2013), dan 59,60 (2014). Hal ini berarti pada tahun 2010 setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 53 penduduk, 2011 menjadi sekitar 54 penduduk, 2012 menjadi 57 penduduk, 2013 menjadi 58 penduduk dan 2014 meningkat lagi menjadi 60 penduduk.

3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹.

⁹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 15. Perkembangan dan Struktur PMTB
Provinsi Riau, 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	95 152,51	117 859,91	134 301,36	148 221,96	170 067,25
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	95 152,51	110 627,86	121 068,56	127 560,70	129 562,83
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	24,49	24,27	24,05	24,40	25,02
Struktur PMTB ¹⁰					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	71 446,83	86 052,08	98 052,10	107 945,16	123 416,05
(%)	75,09	73,01	73,01	72,83	72,57
b. Non Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	23 705,68	31 807,82	36 249,26	40 276,80	46 651,20
(%)	24,91	26,99	26,99	27,17	27,43
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	95 152,51	117 859,90	134 301,36	148 221,96	170 067,25
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan ¹¹ (%)					
a. Bangunan	-	11,34	9,52	6,98	1,23
b. Non Bangunan	-	31,09	9,23	1,21	2,48

Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2010 - 2014 berfluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2010 pertumbuhan PMTB 4,36 persen; 16,26 persen (2011); 9,44 persen (2012); 5,36 persen (2013) dan 1,57 persen (2014). Begitu juga pertumbuhan sub komponen bangunan mengikuti pola pertumbuhan total PMTB, sedangkan untuk komponen non bangunan berfluktuasi setiap tahunnya (dapat dilihat pada Tabel 15).

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Kontribusi bangunan terhadap total PMTB relatif stabil pada kisaran 72 sampai dengan 75 persen, walaupun kontribusi selama periode 2010 – 2014 cenderung mengalami penurunan. Sedangkan kontribusi non bangunan berbanding terbalik dengan bangunan. Dimana komponen non bangunan kontribusinya cenderung meningkat dari tahun 2010 sebesar 24,91 persen menjadi 27,43 persen pada tahun 2014.

Sementara jika dilihat pertumbuhannya, sub komponen bangunan menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya, dimana pada tahun 2011, 2012 dan 2013 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 11,34 persen, 9,52 persen dan 6,98. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut dikarena di Riau sedang mempersiapkan PON 2012 dengan dibangunnya berbagai sarana prasarana PON seperti stadion olahraga, venue, jalan dan jembatan layang di 2 titik kota Pekanbaru. Disamping itu juga pembangunan Bandara International Sultan Syarif Kasim II dan Jembatan Siak IV yang pembangunan dipercepat dalam menyambut PON tersebut. Walaupun pada tahun 2013 PON sudah berakhir, tetapi pertumbuhan komponen bangunan masih cukup tinggi disebabkan masih berjalannya pembangunan perluasan bandara dan jembatan Siak IV, disamping pembangunan rumah tempat tinggal, ruko, gedung kantor dan lainnya.

Sedangkan untuk pertumbuhan komponen non bangunan berfluktuatif setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2010-2014. Dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 31,09 persen dan terendah pada tahun 2013 sebesar 1,21 persen. Untuk komponen non bangunan di Riau kegiatan yang mendukung pertumbuhan adalah biaya yang dikeluarkan untuk perluasan areal perkebunan dan biaya perawatan tanaman perkebunan belum menghasilkan.

3.6. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif

(disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 16. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Provinsi Riau, 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	12 399,01	20 884,90	29 094,99	35 401,42	30 133,34
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	12 399,01	20 509,74	20 804,71	14 950,46	11 199,14
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	3,19	4,30	5,21	5,83	4,43

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Perubahan inventori di Riau mengalami fluktuasi setiap tahunnya (dapat dilihat pada Tabel 16). Selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2014, perubahan inventori terbesar terdapat pada tahun 2013 sebesar 35.401,42 Miliar Rupiah dengan kontribusi sebesar 5,83 persen terhadap total PDRB dan terendah pada tahun 2010 sebesar 12.399,01 Miliar Rupiah dengan kontribusi sebesar 3,19 persen. Pada tahun 2013 perubahan inventori Riau cukup tinggi karena adanya peningkatan stok CPO akibat tekanan dari pasar internasional. Dimana panen raya kedelai di Amerika Serikat, Brazil dan Argentina yang menyebabkan berkurangnya pasar CPO Indonesia.

3.7. PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 17. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Provinsi Riau, 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	151 221,37	186 605,93	257 133,92	241 097,32	262 681,50
b. ADHK 2000 (Miliar Rp)	151 221,37	162 929,19	225 188,74	201 633,01	207 515,24
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	38,92	38,42	46,04	39,69	38,65
Struktur Ekspor ¹²					
a. Barang (Milyar Rp)	150 459,02	185 805,86	256 208,20	239 980,40	261 415,33
(%)	99,50	99,57	99,64	99,54	99,52
b. Jasa (Milyar Rp)	762,35	800,07	925,72	1 116,92	1 266,16
(%)	0,50	0,43	0,36	0,46	0,48
Total Ekspor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹³					
- Barang	-	7,77	38,35	(10,54)	2,92
- Jasa	-	1,38	9,70	9,41	3,01
Total Ekspor	-	7,74	38,21	(10,46)	2,92

Ekspor Riau cukup besar baik secara nilai maupun kontribusinya terhadap total nilai PDRB. Nilai nominal ekspor cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2013 mengalami penurunan, tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2014. Pada tahun 2010, nilai ekspor sebesar 151.221,37 Miliar rupiah dan mencapai 257.133,92 Miliar Rupiah pada tahun 2012. Tetapi pada tahun 2013 menurun tajam menjadi 241.097,32 Miliar Rupiah. Dan pada tahun 2014 meningkat kembali dengan nilai ekspor 262.415,33 Miliar Rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama. Sedangkan kontribusi ekspor berfluktuasi selama kurun waktu 2010 - 2014, dimana kontribusi tertinggi pada

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

tahun 2012 sebesar 46,04 persen dan terendah pada tahun 2011 sebesar 38,42 persen. Komoditi ekspor Riau didominasi oleh ekspor Migas (minyak mentah) dan non migas yaitu CPO (Crude Palm Oil).

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor Riau berupa barang (rata-rata diatas 99 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Sedangkan pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang sangat tinggi, khususnya pada tahun 2012 mencapai 38,21 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang. Sementara itu pertumbuhan minus terjadi pada tahun 2013 (minus 10,46 persen). Pertumbuhan minus tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor barang yang juga menunjukkan pertumbuhan negatif, yaitu minus 10,54 persen. Produksi Migas yang terus menurun dan harga CPO di pasaran internasional yang kurang menguntungkan menyebabkan ekspor secara keseluruhan menurun. Tetapi pada tahun 2014, ekspor luar negeri kembali meningkat sebesar 2,92 persen dengan nilai nominal 262.681,50 Miliar Rupiah.

3.8. PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*)

oleh penduduk (*resident*) Indonesia di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 18 di bawah ini menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Riau pada periode tahun 2010 sampai dengan 2013 cenderung meningkat, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Pada tahun 2010, nilai nominal impor Riau sebesar 15.109,08 Miliar rupiah dan terus meningkat sampai tahun 2013 menjadi 28.638,30 Miliar Rupiah, sedangkan pada tahun 2014 impor mengalami penurunan menjadi 26.480,61 Miliar Rupiah. Sedangkan secara “riil” adh Konstan besarnya mengikuti pola impor adh Berlaku.

**Tabel 18. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Provinsi Riau, 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	15 109,08	23 020,75	28 201,10	28 638,30	26 480,61
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	15 109,08	21 726,94	24 683,13	23 127,60	20 117,98
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	3,89	4,74	5,05	4,71	3,90
Struktur Impor ¹⁴					
a. Barang (<i>Milyar Rp</i>)	10 464,67	18 421,66	22 903,36	22 157,67	20 193,84
(%)	69,26	80,02	81,21	77,37	76,26
b. Jasa (<i>Milyar Rp</i>)	4 644,41	4 599,10	5 297,74	6 480,43	6 286,77
(%)	30,74	19,98	18,79	22,63	23,74
Total Impor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁵					
- Barang	-	63,48	15,85	(9,63)	(93,48)
- Jasa	-	(0,55)	5,28	7,28	(15,41)
Total Impor	-	43,80	13,61	(6,30)	(13,01)

¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

Kontribusi impor LN Riau relatif kecil yaitu berkisar antara 3,89 sampai dengan 5,05 persen. Kontribusi impor LN terbesar pada tahun 2012 sebesar 5,05 persen dan terkecil pada tahun 2010 sebesar 3,89 persen.

Di sisi lain, secara riil nilai impor barang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebesar 63,48 persen dan 15,85 persen. Sedangkan pada tahun berikutnya pertumbuhan impor menurun hingga mencapai minus 9,63 persen pada tahun 2013 dan menurun kembali pada tahun 2014 menjadi minus 93,48 persen. Sedangkan pada pertumbuhan impor jasa, dimana pada tahun 2011 dan 2014 mengalami pertumbuhan minus sebesar minus 0,55 persen dan 15,41 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2012 dan 2013 yaitu sebesar 5,28 persen dan 7,28 persen.

Menurut komposisinya, kontribusi produk impor berbentuk barang berkisar antara 69,26 persen sampai dengan 81,21 persen. Sedangkan sisanya adalah impor jasa berkisar antara 18,79 persen sampai dengan 30,74 persen. Selama periode 2010 - 2014, baik impor barang LN maupun impor jasa memberikan kontribusi yang berfluktuatif setiap tahunnya. Untuk impor barang, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 81,21 persen dan terendah pada tahun 2010 sebesar 69,26 persen. Sedangkan untuk impor jasa, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 23,74 persen dan terendah pada tahun 2012 sebesar 18,79 persen.

3.9. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB

menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "**positif**" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output "bayangan". Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB RIAU
MENURUT PENGELUARAN
TAHUN 2010 - 2014

<http://riau.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

**Tabel 19. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Provinsi Riau, 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	388 578,23	485 649,34	558 492,72	607 498,59	679 692,18
- ADHK 2010	388 578,23	410 215,84	425 625,99	436 206,00	447 616,23
PDRB Perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	69 701,03	84 811,19	94 996,15	100 691,46	109 832,52
- ADHK 2010	69 701,03	71 637,89	72 396,34	72 300,12	72 331,01
Pertumbuhan					
PDRB Perkapita ADHK 2010	-	2,78	1,06	(0,13)	0,04
Jumlah penduduk (000 org)	5 574,93	5 726,24	5 879,11	6 033,27	6 188,44

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

PDRB per-kapita Provinsi Riau menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 19), seiring dengan kenaikan nilai nominal PDRB dan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Riau rata-rata mampu

menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2011 sebesar 2,78 persen menjadi 0,04 persen pada tahun 2014, bahkan pada tahun 2013 pertumbuhan perkapita minus 0,13 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 2,64 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas. Jika dilihat kecenderungan pertumbuhan perkapita secara “riil” Riau yang semakin menurun bahkan minus, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak diikuti dengan peningkatan total PDRB secara “riil” atau dengan kata lain peningkatan PDRB tidak dinikmati secara merata oleh semua penduduk.

4.2. PERBANDINGAN PENGGUNAAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang cukup dominan dalam penggunaan PDRB Riau (sekitar 26,46 s.d. 29,48 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Riau sebagian digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Data pada tabel 20 menunjukkan bahwa pada tahun 2010, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga hanya dari 0,71 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa hanya sebagian dari penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Rasio konsumsi RT terhadap ekspor Riau stabil berada di kisaran 0,58 sampai dengan 0,76. Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga masih sejalan dengan peningkatan nilai ekspor.

Tabel 20. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	107 024,04	128 523,81	149 001,46	171 473,39	200 358,79
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	151 221,37	186 605,93	257 133,92	241 097,32	262 681,50
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	0,71	0,69	0,58	0,71	0,76

4.3. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Riau digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 21. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	107 024,04	128 523,81	149 001,46	171 473,39	200 358,79
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	95 152,51	117 859,91	134 301,36	148 221,96	170 067,25
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	1,12	1,09	1,11	1,16	1,18

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung stabil, berkisar antara 1,09 sampai dengan 1,18. Rasio ini menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya walaupun sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai investasi seiring dengan peningkatan konsumsi akhir rumah tangga.

4.4. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 22. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Riau, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah	107 024,04	128 523,81	149 001,46	171 473,39	200 358,79
b. LNPRT	1 442,39	1 650,93	1 913,57	2 258,19	2 728,47
c. Pemerintah	15 917,52	18 344,81	19 750,38	22 784,83	21 193,85
Jumlah	124 383,96	148 519,56	170 665,41	196 516,41	224 281,10
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	388 578,23	485 649,34	558 492,72	607 498,59	679 692,18
Proporsi	32,01	30,58	30,56	32,35	33,00

Barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Riau digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir berkisar antara 30,56 persen sampai dengan 33,00 persen. Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB tidak berubah secara signifikan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) di Riau memiliki peran yang cukup besar.

4.5. PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk

menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

**Tabel 23. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB),
2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	151 221,37	186 605,93	257 133,92	241 097,32	262 681,50
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	95 152,51	117 859,91	134 301,36	148 221,96	170 067,25
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,59	1,58	1,91	1,63	1,54

Nilai nominal ekspor Riau selalu lebih tinggi dari nilai nominal PMTB. Hal ini memberikan indikasi bahwa pembentukan kapital mendukung untuk terciptanya ekspor. Jika dilihat dari rasio ekspor terhadap PMTB, ada sinergi antara pembentukan kapital dengan ekspor. Rasio ekspor terhadap PMTB di Riau berkisar antara 1,54 sampai dengan 1,91. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor).

4.6. PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 24. Rasio PDRB terhadap Impor
Provinsi Riau, 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	388 578,23	485 649,34	558 492,72	607 498,59	679 692,18
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	15 109,08	23 020,75	28 201,10	28 638,30	26 480,61
Rasio PDRB terhadap Impor	25,72	21,10	19,80	21,21	25,67

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2010 sampai dengan 2014 rasionya cukup besar berkisar antara 19,80 sampai dengan 25,72. Rasio yang cukup besar memberikan indikasi bahwa ketergantungan terhadap impor untuk pembentukan PDRB tidak begitu besar. Rasio tertinggi yang terjadi pada tahun 2010 (25,72), lebih disebabkan nilai nominal PDRB yang besar, sedangkan nilai impor kecil. Dan hal ini terjadi lagi pada tahun 2014, dimana nilai nominal PDRB meningkat sedangkan impor mengalami penurunan, sehingga rasionya besar 25,67. Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

4.7. KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 25. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Riau, 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u>					
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	388 578,23	485 649,34	558 492,72	607 498,59	679 692,18
%	(96,26)	(95,47)	(95,19)	(95,50)	(96,25)
Total nilai Impor ADHB (Miliar Rp)	15 109,08	23 020,75	28 201,10	28 638,30	26 480,61
%	(3,74)	(4,53)	(4,81)	(4,50)	(3,75)
<u>Total Permintaan Akhir¹⁶ (Miliar Rp)</u>					
%	(100,00 %)	(100,00 %)	(100,00 %)	(100,00 %)	(100,00 %)

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian kecil produk masih harus didatangkan dari luar negeri, dengan rentang 3,74 sampai dengan 4,81 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat sudah bisa dipenuhi sekitar 95 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 403.687,31 Miliar (2010) menjadi sebesar 706.172,79 Miliar Rupiah (2014).

¹⁶ Termasuk diskrepansi statistik

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 388.578,23 Miliar Rupiah (2010); 485.649,34 Miliar Rupiah (2011); 558.492,72 Miliar Rupiah (2012); 607.498,59 Miliar Rupiah (2013); dan 679.692,18 Miliar Rupiah (2014). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 15.109,08 Miliar Rupiah (2010); 23.020,75 Miliar Rupiah (2011); 28.201,10 Miliar Rupiah (2012); 28.638,30 Miliar rupiah (2013); dan 26.480,61 Miliar Rupiah (2014).

4.8. NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2010 - 2014, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Riau dengan luar negeri, selalu menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Riau selalu dalam posisi surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “**tabungan luar negeri**”. Surplus perdagangan Provinsi Riau yang

terjadi antara tahun 2010 sampai dengan 2014 tercatat masing-masing sebesar 136.112,29 Miliar Rupiah (2010), 163.585,17 Miliar Rupiah (2011), 228.932,82 Miliar Rupiah (2012), 212.459,02 Miliar Rupiah (2013) dan 236.200,88 Miliar Rupiah.

**Tabel 26. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Provinsi Riau, 2010 – 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	151 221,37	186 605,93	257 133,92	241 097,32	262 681,50
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	15 109,08	23 020,75	28 201,10	28 638,30	26 480,61
Net ekspor (X – M) (Miliar Rp)	136 112,29	163 585,17	228 932,82	212 459,02	236 200,88
Rasio ekspor terhadap Impor	10,01	8,11	9,12	8,42	9,92

Sementara rasio ekspor terhadap impor berfluktuasi tapi cenderung stabil dari tahun 2010-2014 berkisar antara 8,11 sampai dengan 10,01. Pada tahun 2010 rasionya sebesar 10,01 menjadi sekitar 8,11 pada tahun 2011, kemudian 9,12 pada tahun 2012, sebesar 8,42 pada tahun 2013 dan 9,92 pada tahun 2014.

4.9. RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Data pada tabel dibawah menunjukkan bahwa pada periode tahun 2010-2014, posisi ekspor selalu lebih tinggi dari impor. Adapun koefisien RPI berkisar positif 1, yaitu 0,82 (2010), 0,78 (2011), 0,80 (2012), 0,79 (2013) dan 0,82 (2014). Nilai nominal ekspor dari tahun 2010 sampai dengan 2012 cenderung meningkat setiap tahunnya, tetapi pada

tahun 2013 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2014 meningkat kembali. Begitu pula dengan impor, nilai nominalnya meningkat setiap tahunnya (dari tahun 2010 sampai dengan 2013), tetapi mengalami penurunan pada tahun 2014.

**Tabel 27. Rasio Perdagangan Internasional
Provinsi Riau, 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	151 221,37	186 605,93	257 133,92	241 097,32	262 681, 50
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	15 109,08	23 020,75	28 201,10	28 638, 30	26 480,61
(X – M) (Miliar Rp)	136 112,29	163 585,17	228 932,82	212 459,02	236 200,88
(X +M) (Miliar Rp)	166 330,46	209 626,68	285 335,02	269 735,63	289 162,11
R P I	0,82	0,78	0,80	0,79	0,82

Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Riau pada periode 2010-2014 mengindikasikan bahwa perdagangan internasionalnya selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, dengan rasio yang cukup baik yaitu hampir mendekati 1.

4.10. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap

pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 28. Incremental Capital Output Ratio
Provinsi Riau, 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	388 578,23	410 215,84	425 625,99	436 206,00	447 616,23
Perubahan (miliar rupiah)	18 294,34	21 637,61	15 410,16	10 580,00	11 410,23
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	95 152,51	110 627,86	121 068,56	127 560,70	129 562,83
ICOR	5,20	5,11	7,86	12,06	11,35

Tabel 28 menunjukkan besaran ICOR Riau yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Nilai rasio yang dihasilkan juga termasuk tinggi di atas 5. Hal ini berarti bahwa dibutuhkan investasi yang lebih besar untuk dapat meningkatkan output di Riau. Sebagaimana diketahui bahwa PDRB Riau sangat dipengaruhi produksi Migas yang semakin lama produksinya semakin menurun. Dan hal ini menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Riau menjadi melambat. Untuk dapat meningkatkan output Migas diperlukan investasi yang sangat besar.

BAB V
PENUTUP

<http://riau.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2010 s.d 2014 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Riau pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2010 s.d 2014, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Riau terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

LAMPIRAN

<http://riau.bps.go.id>

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Riau Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Pengeluaran , 2010-2014

<i>(Miliar Rupiah)</i>					
Komponen Pengeluaran	2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	107.024,05	128.523,81	149.001,46	171.473,39	200.358,79
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	46.325,85	55.143,27	63.061,26	72.063,01	84.044,45
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3.917,55	4.735,36	5.517,82	6.233,46	7.516,51
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10.355,13	12.626,36	14.589,19	16.360,39	19.546,42
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6.067,56	7.173,79	7.762,51	8.894,13	10.745,86
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	34.598,89	41.806,62	49.585,64	58.250,37	66.767,84
1.f. Hotel dan Restoran	2.876,10	3.332,40	4.092,56	4.943,62	6.388,25
1.g. Lainnya	2.882,95	3.706,02	4.392,47	4.728,41	5.349,47
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.442,39	1.650,93	1.913,57	2.258,19	2.728,47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	15.917,52	18.344,81	19.750,38	22.784,83	21.193,85
3.a. Konsumsi Kolektif	9.792,91	10.664,35	12.333,45	13.809,67	12.821,77
3.b. Konsumsi Individu	6.124,62	7.680,46	7.416,94	8.975,16	8.372,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	95.152,51	117.859,91	134.301,36	148.221,96	170.067,25
4.a. Bangunan	71.446,83	86.052,08	98.052,11	107.945,16	123.416,05
4.b. Non-Bangunan	23.705,68	31.807,82	36.249,26	40.276,80	46.651,20
5. Perubahan Inventori	12.399,01	20.884,90	29.094,99	35.401,42	30.133,34
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	151.221,37	186.605,93	257.133,92	241.097,32	262.681,50
6.a. Barang	150.459,02	185.805,86	256.208,20	239.980,40	261.415,33
6.b. Jasa	762,35	800,07	925,72	1.116,92	1.266,16
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	15.109,08	23.020,75	28.201,10	28.638,30	26.480,61
7.a. Barang	10.464,67	18.421,66	22.903,36	22.157,87	20.193,84
7.b. Jasa	4.644,41	4.599,10	5.297,74	6.480,43	6.286,77
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	20.530,45	34.799,80	(4.501,86)	14.899,79	19.009,60
8.a. Ekspor	78.579,70	105.145,94	68.007,00	93.600,89	108.032,23
8.b. Impor	58.049,25	70.346,14	72.508,86	78.701,10	89.022,63
PDRB (1+2+3+4+5+6-7+8)	388.578,23	485.649,34	558.492,72	607.498,59	679.692,18
* Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran , 2010-2014**

<i>(Miliar Rupiah)</i>					
Komponen Pengeluaran	2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	107.024,05	115.084,79	122.841,59	131.131,82	140.607,69
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	46.325,85	49.280,16	52.479,28	55.237,93	58.595,09
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3.917,55	4.372,83	4.716,57	5.132,56	5.639,19
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10.355,13	11.029,21	11.538,05	12.282,32	13.331,18
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6.067,56	6.472,68	6.904,98	7.524,15	8.189,38
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	34.598,89	37.203,20	39.784,50	42.838,01	45.900,10
1.f. Hotel dan Restoran	2.876,10	3.259,53	3.652,88	4.053,37	4.445,64
1.g. Lainnya	2.882,95	3.467,17	3.765,32	4.063,48	4.507,10
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.442,39	1.528,42	1.624,58	1.755,96	2.027,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	15.917,52	16.714,28	16.843,09	18.317,42	17.622,79
3.a. Konsumsi Kolektif	9.792,91	9.467,54	10.542,25	11.175,44	10.739,72
3.b. Konsumsi Individu	6.124,62	7.246,74	6.300,84	7.141,99	6.883,07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	95.152,51	110.627,86	121.068,56	127.560,70	129.562,83
4.a. Bangunan	71.446,83	79.551,39	87.124,80	93.205,93	94.355,81
4.b. Non-Bangunan	23.705,68	31.076,46	33.943,76	34.354,77	35.207,02
5. Perubahan Inventori	12.399,01	20.509,74	20.604,71	14.950,46	11.199,14
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	151.221,37	162.929,19	225.188,74	201.633,01	207.515,24
6.a. Barang	150.459,02	162.156,36	224.340,97	200.705,48	206.559,77
6.b. Jasa	762,35	772,83	847,77	927,53	955,47
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	15.109,08	21.726,94	24.683,13	23.127,60	20.117,98
7.a. Barang	10.464,67	17.108,10	19.820,48	17.910,93	15.705,24
7.b. Jasa	4.644,41	4.618,84	4.862,65	5.216,66	4.412,75
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	20.530,45	4.548,51	(57.862,16)	(36.015,78)	(40.800,55)
8.a. Ekspor	78.579,70	73.298,60	82.558,94	87.102,43	15.802,93
8.b. Impor	58.049,25	68.750,10	140.421,09	123.118,20	56.603,49
PDRB (1+2+3+4+5+6-7+8)	388.578,23	410.215,84	425.626,00	436.206,00	447.616,23
* Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran , 2010-2014

<i>(Miliar Rupiah)</i>					
Komponen Pengeluaran	2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	27,54	26,46	26,68	28,23	29,48
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	11,92	11,35	11,29	11,86	12,37
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,01	0,98	0,99	1,03	1,11
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,66	2,60	2,61	2,69	2,88
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,56	1,48	1,39	1,46	1,58
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,90	8,61	8,88	9,59	9,82
1.f. Hotel dan Restoran	0,74	0,69	0,73	0,81	0,94
1.g. Lainnya	0,74	0,76	0,79	0,78	0,79
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,37	0,34	0,34	0,37	0,40
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	4,10	3,78	3,54	3,75	3,12
3.a. Konsumsi Kolektif	2,52	2,20	2,21	2,27	1,89
3.b. Konsumsi Individu	1,58	1,58	1,33	1,48	1,23
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	24,49	24,27	24,05	24,40	25,02
4.a. Bangunan	18,39	17,72	17,56	17,77	18,16
4.b. Non-Bangunan	6,10	6,55	6,49	6,63	6,86
5. Perubahan Inventori	3,19	4,30	5,21	5,83	4,43
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	38,92	38,42	46,04	39,69	38,65
6.a. Barang	38,72	38,26	45,87	39,50	38,46
6.b. Jasa	0,20	0,16	0,17	0,18	0,19
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	3,89	4,74	5,05	4,71	3,90
7.a. Barang	2,69	3,79	4,10	3,65	2,97
7.b. Jasa	1,20	0,95	0,95	1,07	0,92
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	5,28	7,17	(0,81)	2,45	2,80
8.a. Ekspor	20,22	21,65	12,18	15,41	15,89
8.b. Impor	14,94	14,48	12,98	12,95	13,10
PDRB (1+2+3+4+5+6-7+8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran , 2010-2014**

<i>(Miliar Rupiah)</i>					
Komponen Pengeluaran	2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	-	7,53	6,74	6,75	7,23
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-	6,38	6,49	5,26	6,08
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	-	11,62	7,86	8,82	9,87
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-	6,51	4,61	6,45	8,54
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	-	6,68	6,68	8,97	8,84
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-	7,53	6,94	7,68	7,15
1.f. Hotel dan Restoran	-	13,33	12,07	10,96	9,68
1.g. Lainnya	-	20,26	8,60	7,92	10,92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-	5,96	6,29	8,09	15,44
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	-	5,01	0,77	8,75	(3,79)
3.a. Konsumsi Kolektif	-	(3,32)	11,35	6,01	(3,90)
3.b. Konsumsi Individu	-	18,32	(13,05)	13,35	(3,63)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	-	16,26	9,44	5,36	1,57
4.a. Bangunan	-	11,34	9,52	6,98	1,23
4.b. Non-Bangunan	-	31,09	9,23	1,21	2,48
5. Perubahan Inventori	-	65,41	0,46	(27,44)	(25,09)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-	7,74	38,21	(10,46)	2,92
6.a. Barang	-	7,77	38,35	(10,54)	2,92
6.b. Jasa	-	1,38	9,70	9,41	3,01
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	-	43,80	13,61	(6,30)	(13,01)
7.a. Barang	-	63,48	15,85	(9,63)	(12,31)
7.b. Jasa	-	(0,55)	5,28	7,28	(15,41)
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-	(77,85)	(1.372,11)	(37,76)	13,29
8.a. Ekspor	-	(6,72)	12,63	5,50	(81,86)
8.b. Impor	-	18,43	104,25	(12,32)	(54,03)
PDRB (1+2+3+4+5+6-7+8)	-	5,57	3,76	2,49	2,62
* Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					

Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Riau (2010 = 100)

Menurut Pengeluaran , 2010-2014

<i>(Miliar Rupiah)</i>					
Komponen Pengeluaran	2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100	112	121	131	142
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100	112	120	130	143
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100	108	117	121	133
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100	114	126	133	147
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100	111	112	118	131
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100	112	125	136	145
1.f. Hotel dan Restoran	100	102	112	122	144
1.g. Lainnya	100	107	117	116	119
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100	108	118	129	135
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100	110	117	124	120
3.a. Konsumsi Kolektif	100	113	117	124	119
3.b. Konsumsi Individu	100	106	118	126	122
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100	107	111	116	131
4.a. Bangunan	100	108	113	116	131
4.b. Non-Bangunan	100	102	107	117	133
5. Perubahan Inventori	100	102	141	237	269
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	100	115	114	120	127
6.a. Barang	100	115	114	120	127
6.b. Jasa	100	104	109	120	133
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	100	106	114	124	132
7.a. Barang	100	108	116	124	129
7.b. Jasa	100	100	109	124	142
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100	765	8	(41)	(47)
8.a. Ekspor	100	143	82	107	684
8.b. Impor	100	102	52	64	157
PDRB (1+2+3+4+5+6-7+8)	100	118	131	139	152
* Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Riau (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran , 2010-2014**

<i>(Miliar Rupiah)</i>					
Komponen Pengeluaran	2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	-	11,68	8,61	7,81	8,97
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-	11,90	7,39	8,57	9,94
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	-	8,29	8,03	3,81	9,75
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-	14,48	10,45	5,35	10,07
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	-	10,83	1,43	5,15	11,01
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-	12,37	10,91	9,10	6,98
1.f. Hotel dan Restoran	-	2,24	9,59	8,86	17,82
1.g. Lainnya	-	6,89	9,14	(0,25)	2,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-	8,02	9,05	9,18	4,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	-	9,76	6,84	6,08	(3,32)
3.a. Konsumsi Kolektif	-	12,64	3,86	5,63	(3,39)
3.b. Konsumsi Individu	-	5,99	11,07	6,76	(3,21)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	-	6,54	4,12	4,75	12,97
4.a. Bangunan	-	8,17	4,04	2,91	12,94
4.b. Non-Bangunan	-	2,35	4,34	9,78	13,02
5. Perubahan Inventori	-	1,83	38,67	67,69	13,63
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-	14,53	(0,30)	4,72	5,86
6.a. Barang	-	14,58	(0,33)	4,70	5,84
6.b. Jasa	-	3,52	5,48	10,28	10,05
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	-	5,95	7,83	8,38	6,30
7.a. Barang	-	7,68	7,31	7,06	3,94
7.b. Jasa	-	(0,43)	9,42	14,02	14,69
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-	665,08	(98,98)	(631,73)	12,62
8.a. Ekspor	-	43,45	(42,58)	30,45	536,16
8.b. Impor	-	2,32	(49,53)	23,79	146,04
PDRB (1+2+3+4+5+6-7+8)	-	18,39	10,84	6,14	9,03
* Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					

DAFTAR PUSTAKA

<http://riau.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.

16. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
17. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
18. _____, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*, Series F No. 50, New York, 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No. 12, Pekanbaru, 28131

Telp. (0761) 23042, Fax. (0761) 21336

Homepage: <http://riau.bps.go.id> Email: bps1400@bps.go.id